



2022

**LAPORAN HASIL
MONITORING DAN EVALUASI
PPID PELAKSANA KOTA MADIUN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena atas perkenaanannya maka laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2022 pada bulan November 2022 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui PPID merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pembentukan citra pada suatu lembaga. PPID merupakan corong badan publik khususnya pemerintah daerah dalam menyampaikan program kerja dan kebijakan pemerintah yang juga dituntut untuk dapat mampu meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan beberapa program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Terlebih di era industri 4.0, PPID diminta secara aktif menggunakan berbagai macam kanal/media informasi terlebih pemanfaatan TIK dalam menjalankan tugas dan perannya. Dalam penggunaan media informasi juga terjadi perubahan paradigma pola komunikasi dimana pada era saat ini komunikasi tidak hanya dua arah saja melainkan *multiple communication*, yakni melalui penyampaian informasi yang kaya data diharapkan publik dapat menjadi *opinion maker* untuk menyampaikan informasi positif tentang pemerintahan sehingga juga mampu mengajak masyarakat ikut andil dalam jalannya pemerintahan

Pelaksanaan Monev ini secara rutin setiap tahunnya, pada tahun ini dilakukan bulan November kemarin yakni tepatnya tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 atau kurang lebih dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Adapun Tim Monev yang melakukan visitasi terdiri dari Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik/Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai pimpinan rombongan dan 3 orang staff serta 1 orang petugas PPID Utama Kota Madiun.

Visitasi dilakukan untuk menyampaikan hasil dari evaluasi PPID Kota Madiun kepada PPID Pelaksana, mengetahui permasalahan yang ada di setiap PPID Pelaksana, sekaligus mencatat saran dan masukan dari PPID Pelaksana untuk perbaikan pengembangan pelayanan informasi dan pelaksanaan tugas dan peranan PPID Kota Madiun dan PPID Pelaksana sekaligus juga mengetahui sarana dan prasarana pelayanan PPID di tiap unit PPID Pelaksana.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, sehingga saran perbaikan dan masukan untuk penyempurnaan yang akan datang kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaannya serta memberikan masukan dan saran perbaikan, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan bagi peningkatan keterbukaan informasi publik.



Ditandatangani secara elektronik oleh
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PEMERINTAH KOTA MADIUN
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI

Subakri, S.Sos., MS.i
 NIP. 19680904 198903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan	4
Ruang Lingkup.....	5
Bab II Pelaksanaan dan Hasil Monitoring dan Evaluasi	7
Evaluasi Website Berdasarkan Terpenuhinya SAQ	9
Hasil Tangkapan Layar PPID Pelaksana 5 Besar Terbaik	21
Bab III Kesimpulan	31
Kepatuhan Pengisian SAQ.....	31
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	33
Bab IV Lampiran Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Kepatuhan Pengisian SAQ OPD	31
Tabel II	: Kepatuhan Pengisian SAQ Kelurahan.....	32
Tabel III	: Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	33

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik berupa data, fakta atau penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan hal tersebut pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga menerangkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Sejalan dengan Undang–Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP dan wujud tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*), Pemerintah Kota Madiun sebagai badan publik dalam penyediaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat menetapkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Peraturan Walikota ini sebagai dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun.

PPID Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut terdiri dari PPID Kota Madiun yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan dibantu oleh 64 PPID Pelaksana baik itu OPD, BUMD, Kecamatan maupun Kelurahan. Pembentukan PPID Kota Madiun ini juga sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

SARANA DAN PRASARANA PPID KOTA MADIUN

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kota Madiun telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:

- a. Kursi tamu dan kursi tunggu;
- b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi (Meja Desk Informasi);
- c. Ruang Konsultasi PPID;
- d. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
- e. 1 (satu) unit telepon dan 1 (satu) unit printer;
- f. 3 (tiga) lemari arsip.

Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan dengan;

Pemerintah Kota Madiun melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media:

- a. Melalui website
 1. ppid.madiunkota.go.id
 2. madiunkota.go.id
 3. madiuntoday.id
- b. Melalui aplikasi E-PPID
- c. Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID
- d. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0351) 467327 / WA 08113577800
- e. Melalui media sosial
 1. FP Pemerintah Kota Madiun
 2. FP Madiuntoday
 3. Ig @pemkotmadiun_
 4. Ig @ppidkotamadiun
 5. Ig @madiuntoday.id
 6. Twitter @pemkotmadiun_
 7. Twitter @madiuntoday.id
 8. Youtube Pemerintah Kota Madiun

- f. Melalui aplikasi SP4N LAPOR!
- g. Majalah Pendekar
- h. LPPL Radio Suara Madiun
- i. Melalui tatap muka / sosialisasi
- j. Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID Kota Madiun dengan PPID Pelaksana dalam melakukan pemenuhan informasi publik.
- k. Monitoring dan Evaluasi / Visitasi PPID Kota Madiun ke PPID Pelaksana.

Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kota Madiun maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pelaksana).

Sebagai bentuk koordinasi PPID Kota Madiun kepada PPID Pelaksana dalam memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik maka secara rutin dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada PPID Pelaksana. Dimana tujuan pelaksanaan Monev ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana.

Pelaksanaan Monev PPID

Pelaksanaan Monev PPID Pelaksana Tahun 2022 ini dilaksanakan melalui pengisian lembar SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) untuk mengetahui kelengkapan website PPID Pelaksana, kepatuhan dalam keterbukaan informasi publik serta kendala atau permasalahan apa yang dihadapi oleh PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya untuk menyediakan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang – Undang KIP.

Tujuan pengisian SAQ tersebut adalah agar PPID Pelaksana dapat mengetahui informasi dan dokumentasi publik apa saja yang wajib disediakan, sehingga secara tidak langsung akan berusaha untuk memenuhi permohonan informasi publik yang ada di SAQ.

Selain hal tersebut, pelaksanaan visitasi untuk melihat atau kroscek di lapangan dari hasil pengisian SAQ dan mengetahui permasalahan di PPID Pelaksana dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Visitasi hanya dilaksanakan pada PPID Pelaksana 5 terbaik dan 5 terendah yang masuk berdasarkan pengisian kuisisioner yang telah dikirimkan oleh masing-masing PPID Pelaksana.

Monev tahun 2022 juga mengevaluasi hasil dari pelatihan-pelatihan admin PPID Pelaksana, apakah admin dari PPID Pelaksana telah menerapkan atau mengaplikasikan di masing-masing konten website atau belum sekaligus melihat inovasi-inovasi yang diciptakan oleh PPID Pelaksana dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

Tim visitasi juga memberikan saran, masukan serta menyampaikan hal-hal apa sekiranya dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya melalui website PPID serta bagaimana sikap dalam menjawab permohonan informasi publik yang bersifat sensitif agar tidak terjadi sengketa informasi dikemudian hari. PPID Kota Madiun dengan tangan terbuka akan membantu memfasilitasi jika terjadi permohonan informasi yang bersifat sensitif tersebut.

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun tahun 2022, setelah dilaksanakan visitasi dilanjutkan pada tahapan presentasi Admin PPID Pelaksana. Tahapan ini diikuti oleh 5 Admin PPID Pelaksana OPD terbaik dan 5 Admin PPID Pelaksana Kelurahan terbaik. Serta, setelah pemaparan dilaksanakan sesi tanya jawab oleh PPID Kota Madiun dan peserta presentasi Admin PPID Pelaksana lainnya.

Sehingga dengan adanya Monev PPID Pelaksana ini dapat diketahui sampai sejauh mana keseriusan di unit PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dan nantinya diharapkan PPID Kota Madiun dapat terus meningkatkan pelayanan penyediaan informasi dan dokumentasi publik yang menjadi indikator tingkat keterbukaan informasi publik di Kota Madiun khususnya.

II. Tujuan

Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2022 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sampai sejauh mana pemahaman PPID Pelaksana mengenai informasi publik yang wajib disediakan serta klasifikasi terhadap informasi.
2. Mengetahui kelengkapan isi/konten website PPID Pelaksana.
3. Mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana dalam mengelola websitenya.
4. Untuk mencari saran dan masukan dari PPID Pelaksana mengenai apa saja yang bisa dilaksanakan oleh PPID Kota Madiun sebagai bagian koordinasi dalam peningkatan pelayanan informasi publik.
5. Mengetahui penerapan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana, khususnya jika ada permohonan informasi yang bersifat sensitif.

6. Penguatan data melalui website PPID Pelaksana sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Madiun dalam merespon dan menindaklanjuti perubahan era memasuki era industri 4.0.
7. Pemantauan dan koordinasi yang intensif antara PPID Kota Madiun dan PPID Pelaksana Kota Madiun.

III. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pelaksana ini mencakup dua sub kegiatan yakni monitoring dan evaluasi yang secara rinci uraian kegiatannya meliputi:

1. Monitoring

Monitoring untuk melihat kelengkapan website PPID Pelaksana yang terdiri

- Profil OPD
- Visi dan Misi
- Tugas dan Fungsi
- Bagan Struktur OPD
- Nama Pejabat Struktural
- Program / Kegiatan dan Anggaran
- Data Pegawai
- Berita
- Produk Hukum
- Layanan Publik
- Struktur PPID
- Daftar Informasi Publik
 - a. Informasi serta merta
 - b. Informasi setiap saat
 - c. Informasi berkala
 - d. Informasi yang dikecualikan
- Aspirasi dan Pengaduan
- Laporan akses informasi publik
- Kontak PPID
- Tampilan Website
- Kemudahan navigasi
- Transparansi anggaran, sesuai dengan amanat dan peraturan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021
- Inovasi dalam memberikan pelayanan dan informasi public

2. Visitasi langsung ke PPID Pelaksana

Tujuan visitasi yakni untuk mengetahui data – data sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang ada di masing – masing PPID Pelaksana;
- 2) Saran, masukan dan pelatihan apa saja yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan SDM dari admin PPID Pelaksana;
- 3) Sarana dan prasarana pelayanan PPID di tingkat PPID Pelaksana.

3. Evaluasi

Sedangkan evaluasi mencakup:

- Kendala/permasalahan teknis pengisian website;
- Kendala/permasalahan pengisian konten berita kegiatan;
- Kendala/permasalahan pengklasifikasian informasi;
- Kendala/permasalahan transparansi anggaran;
- Kendala/permasalahan pemahaman tupoksi PPID;
- Kendala/permasalahan penggunaan TIK dalam mengoperasikan website PPID Pelaksana termasuk optimalisasi tampilan website;
- SDM dari pengelola PPID Pelaksana.
- Kendala dalam pemberian Informasi Publik ke masyarakat

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi

Pada pelaksanaan kegiatan Monev PPID Pelaksana Tahun 2022, Tim Monev PPID Kota Madiun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di masing – masing unit PPID Pelaksana. Evaluasi ini dilakukan ke PPID Pelaksana dengan rincian PPID Pelaksana OPD 5 terbaik dan 5 terendah, serta PPID Pelaksana Kelurahan 5 terbaik dan 5 terendah.

Sedangkan apa saja yang dievaluasi yakni meliputi kelengkapan website, keterbukaan penyajian informasi, kemudahan dalam menemukan kategori yang diinginkan, *update* terhadap informasi kegiatan di masing – masing PPID Pelaksana, tampilan penyajian informasi di website, serta inovasi apa saja yang memudahkan pelayanan informasi publik.

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya PPID Pelaksana diwajibkan mengisi SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) dan dikirim kembali ke PPID Kota Madiun sebagai dasar penilaian tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. SAQ diisi sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga setelah masa pengisian SAQ selesai lalu dilakukan evaluasi SAQ masing – masing PPID Pelaksana. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah yang diisi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan (website PPID Pelaksana). Dasar dari pengisian SAQ digunakan untuk menentukan peringkat sebagai dasar dilakukan visitasi ke PPID Pelaksana.

Tim visitasi Monev PPID Pelaksana Tahun 2022 beranggotakan Kepala Bidang IKP, Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik, Pranata Humas dan satu orang petugas PPID Kota Madiun. Visitasi monitoring dan evaluasi (Monev) PPID Pelaksana tahun 2022 dilaksanakan mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 atau kurang lebih dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu.

Visitasi dilakukan untuk menyampaikan hasil dari evaluasi PPID Kota Madiun kepada PPID Pelaksana, mengetahui permasalahan yang ada di setiap PPID Pelaksana, sekaligus mencatat saran dan masukan dari PPID Pelaksana untuk perbaikan pengembangan pelayanan informasi dan pelaksanaan tugas dan peranan PPID Kota Madiun dan PPID Pelaksana sekaligus juga mengetahui sarana dan prasarana pelayanan PPID di tiap unit PPID Pelaksana. Setiap hasil dari visitasi dicatat dan didokumentasikan oleh tim Monev PPID sebagai bahan

pelaporan dan juga bahan untuk melakukan perbaikan pelayanan khususnya di PPID Kota Madiun.

Hasil visitasi ini juga menjadi bahan masukan bagi PPID Kota Madiun untuk menentukan bentuk dan model koordinasi maupun pembinaan apa selanjutnya yang dapat difasilitasi oleh PPID Kota Madiun ke PPID Pelaksana. Tidak lupa dalam setiap kunjungan, tim monev juga memberikan saran dan masukan yang dapat membantu atau setidaknya menjadi masukan buat PPID Pelaksana dalam meningkatkan pelayanan informasi publiknya guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dari hasil visitasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2022 ini, kendala dan permasalahan yang dialami oleh PPID Pelaksana sebagian besar masih sama dengan yang ditemui pada Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana tahun sebelumnya, dimana permasalahan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM;
2. SDM yang kurang handal khususnya dalam bidang penulisan naskah berita dan IT pengelolaan website;
3. SDM khususnya di tingkat PPID Pelaksana Kelurahan banyak yang berganti admin;
4. Manajemen Waktu yang belum tertata baik;
5. Admin yang juga merangkap tugas lainnya;
6. Pergantian admin tanpa adanya proses regenerasi sebelumnya.

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun Tahun 2022 ini, setelah tahapan visitasi ditambahkan tahapan presentasi paparan oleh Admin PPID Pelaksana. Tahapan presentasi ini baru dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 di GCIO Kota Madiun. Peserta pada tahapan ini merupakan 5 admin PPID Pelaksana OPD terbaik dan 5 admin PPID Pelaksana Kelurahan terbaik.

Pada tahapan presentasi Admin PPID Pelaksana menyampaikan paparan mengenai profil badan publik, keterbukaan informasi, pelayanan informasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Setelah Admin PPID Pelaksana menyampaikan paparan, dilanjutkan sesi tanya jawab dengan PPID Kota Madiun dan peserta presentasi Admin PPID Pelaksana lainnya.

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pelaksana ini adalah sebagai berikut

I. Evaluasi Website berdasarkan terpenuhinya pengisian SAQ:

a. PPID Pelaksana OPD

Evaluasi Pengisian SAQ PPID Pelaksana OPD Kota Madiun Tahun 2022

No	Nama OPD	Kategori	Keterangan
1	BKAD	Informatif	Lengkap
2	Sekretariat DPRD	Informatif	Lengkap
3	Bagian Umum	Informatif	Lengkap
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja
5	Satpol PP dan Damkar	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja
6	Dinas Perhubungan	Informatif	Kurang dokumen perjanjian kerjasama
7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja
8	Kecamatan Taman	Informatif	Kurang informasi pengadaan barang dan jasa, dan dokumen perjanjian kerjasama
9	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan dokumen perjanjian kerjasama
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, dan dokumen perjanjian kerjasama

12	Dinas Lingkungan Hidup	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan dokumen perjanjian kerjasama
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, dan tupoksi mengeluarkan izin
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi tahun 2021, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan dokumen perjanjian kerjasama
15	Inspektorat	Informatif	Kurang program kegiatan tahun 2022, informasi penerimaan calon tenaga kerja, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Menuju Informatif	Kurang tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, dan kurang bukti dukung variabel menyediakan
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Menuju Informatif	Kurang LHKPN terbaru, agenda penting tugas badan publik, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, dan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat
18	Dinas Pembangunan Umum dan Tata Ruang	Menuju Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan media sosial yang terhubung dengan website

19	Dinas Perdagangan	Menuju Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan dokumen perjanjian kerjasama
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait calon penerimaan tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan dokumen perjanjian kerjasama
21	Bagian Organisasi	Menuju Informatif	Kurang ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
22	Bagian Hukum	Menuju Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, dan dokumen perjanjian kerjasama
23	Dinas Pendidikan	Kurang Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, program kegiatan, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan akses informasi publik tahun 2021, pengadaan barang jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, dan variabel menyediakan
24	Kecamatan Kartoharjo	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, agenda badan publik, informasi

			penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, pengadaan barang dan jasa, dan dokumen perjanjian kerjasama
25	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kurang Informatif	Kurang tupoksi badan publik, LHKPN, program kegiatan tahun 2022, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
26	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Kurang Informatif	Kurang ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
27	PDAM	Kurang Informatif	Kurang LHKPN, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, tupoksi mengeluarkan izin, dan inovasi masih dalam bentuk

			proposal
28	Kecamatan Manguharjo	Kurang Informatif	Kurang LHKPN, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dan dokumen perjanjian kerjasama
29	Bagian Pemerintahan	Kurang Informatif	Kurang informasi kedudukan alamat, struktur organisasi badan publik, LHKPN, program kegiatan tahun 2022, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang Informatif	Kurang tupoksi badan publik, program kegiatan tahun 2022, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
31	Badan Pendapatan Daerah	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan tahun 2022, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan

			laporan akses informasi publik tahun 2021, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
32	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kurang Informatif	Kurang LHKPN, program kegiatan tahun 2022, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi tahun 2021, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
33	PD. Bank Daerah	Website error (kendala teknis)	
34	PD. Aneka Usaha	Tidak Informatif	SAQ tidak diisi
35	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak Informatif	Tidak Mengumpulkan SAQ
36	RSUD Kota Madiun	Tidak Informatif	Tidak Mengumpulkan SAQ

b. PPID Pelaksana Kelurahan

Evaluasi Pengisian SAQ PPID Pelaksana Kelurahan Kota Madiun Tahun 2022

No	Nama OPD	Kategori	Keterangan
1	Kelurahan Josenan	Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN
2	Kelurahan Pangongangan	Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN
3	Kelurahan Kanigoro	Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN
4	Kelurahan Manisrejo	Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, informasi penerimaan calon tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, dan dokumen perjanjian kerjasama
5	Kelurahan Winongo	Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, penerimaan calon tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, dan dokumen perjanjian kerjasama
6	Kelurahan Tawangrejo	Menuju Informatif	Kurang informasi penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, dan dokumen perjanjian kerjasama
7	Kelurahan Rejomulyo	Menuju Informatif	Kurang informasi LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
8	Kelurahan Klegen	Menuju Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, LHKPN/LHKASN,

			penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, media sosial yang terhubung dengan website, dokumen perjanjian kerjasama, dan variabel menyediakan
9	Kelurahan Sogaten	Menuju Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, LHKPN/LHKASN, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
10	Kelurahan Banjarejo	Menuju Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, pengadaan barang dan jasa, dokumen perjanjian kerjasama, tupoksi mengeluarkan izin, dan beberapa laman website tidak dapat diakses saat penilaian
11	Kelurahan Madiun Lor	Menuju Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
12	Kelurahan Nambangan Lor	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, informasi penerimaan calon

			tenaga kerja, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama,
13	Kelurahan Ngegong	Kurang Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, LHKPN/LHKASN, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
14	Kelurahan Mojorejo	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
15	Kelurahan Kelun	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, dokumen perjanjian kerjasama, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
16	Kelurahan	Kurang	Kurang LHKPN/LHKASN,

	Pandean	Informatif	program kegiatan tahun 2022, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi Publik Tahun 2021, produk hukum, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, dan dokumen perjanjian kerjasama
17	Kelurahan Demangan	Kurang Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, dan dokumen perjanjian kerjasama
18	Kelurahan Sukosari	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
19	Kelurahan Taman	Kurang Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural terbaru, LHKPN/LHKASN, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, bukti dokumen perjanjian kerjasama, dan bukti

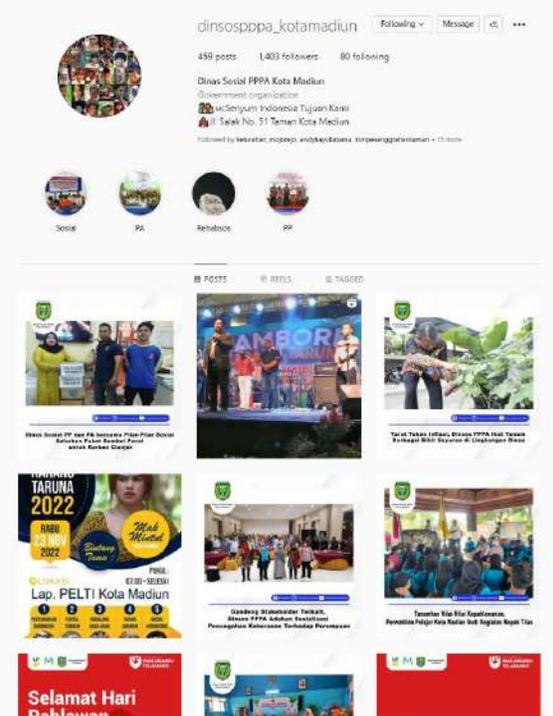
			pada variabel menyediakan
20	Kelurahan Oro-oro Ombo	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, produk hukum, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
21	Kelurahan Kuncen	Kurang Informatif	Kurang LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, daftar informasi publik, dan dokumen perjanjian kerjasama
22	Kelurahan Kejuron	Kurang Informatif	Kurang profil singkat pejabat struktural, LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
23	Kelurahan Nambangan Kidul	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan tahun 2022, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun

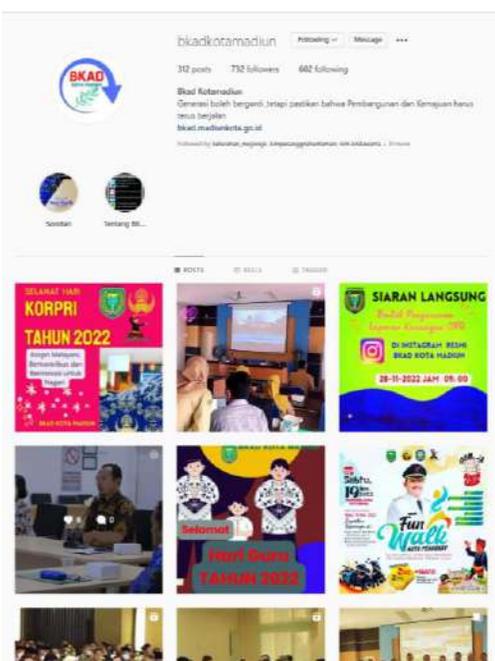
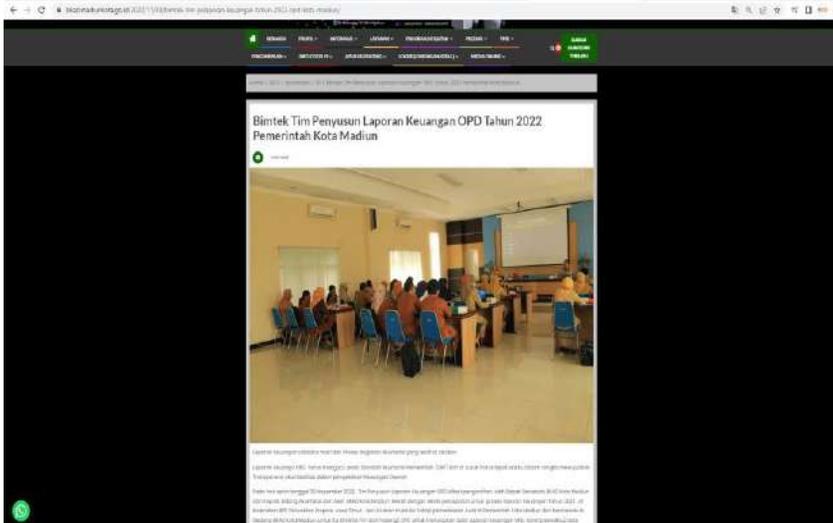
			2021, produk hukum, hak dan tata cara memperoleh informasi, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, media sosial yang terhubung dengan website, dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, tupoksi mengeluarkan izin, dan variabel menyediakan
24	Kelurahan Manguharjo	Kurang Informatif	Kurang tupoksi badan publik, struktur organisasi badan publik, profil singkat pejabat struktural, LHKPN/LHKASN, program kegiatan tahun 2022, agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, penerimaan calon tenaga kerja, ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021, hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengaduan dan pelaporan penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat, media sosial yang terhubung dengan website, daftar informasi publik, dokumen perjanjian kerjasama, dan tupoksi mengeluarkan izin
25	Kelurahan Kartoharjo	Tidak Informatif	Tidak Mengumpulkan SAQ
26	Kelurahan Pilangbango	Tidak Informatif	Tidak Mengumpulkan SAQ
27	Kelurahan Patihan	Tidak Informatif	Tidak Mengumpulkan SAQ

II. Hasil Tangkapan Layar PPID Pelaksana 5 Besar Terbaik dari Hasil Penilaian pada Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022

a. PPID Pelaksana OPD

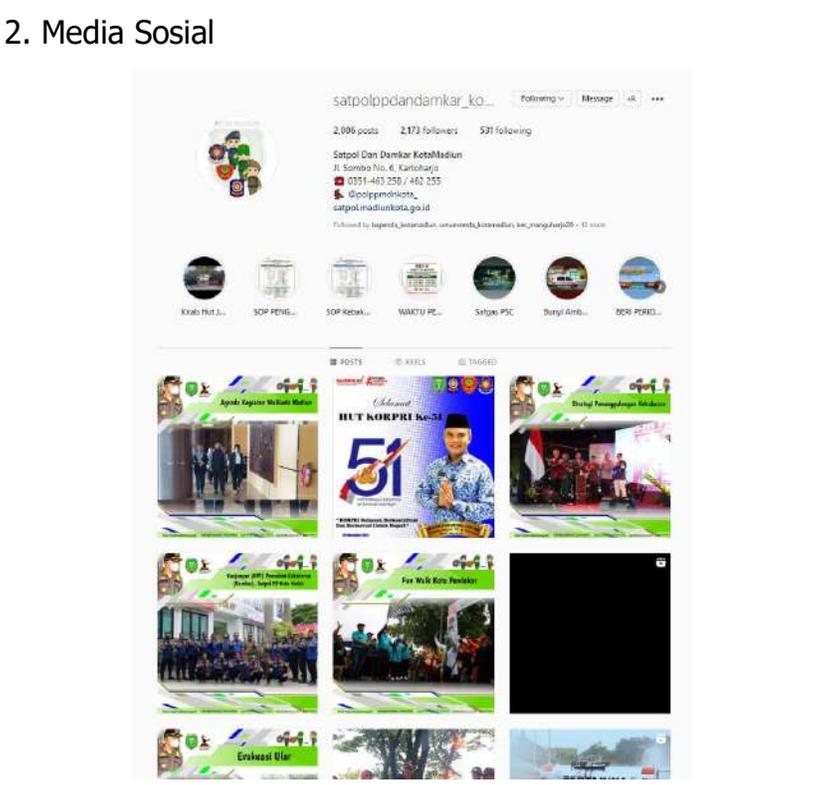
No	Nama OPD	Keterangan
1	Sekretariat DPRD Kota Madiun	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 

<p>2</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun</p>	<p>1. Website</p>  <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun</p> <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 
----------	--	---

<p>3</p>	<p>BKAD Kota Madiun</p>	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 
----------	-------------------------	---

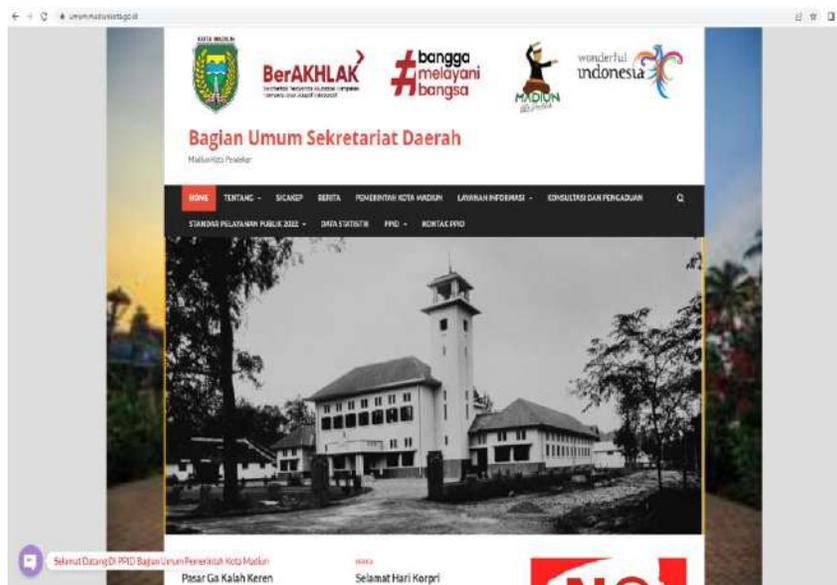
4 Satpol PP dan Damkar Kota Madiun

1. Website
2. Media Sosial
3. Berita

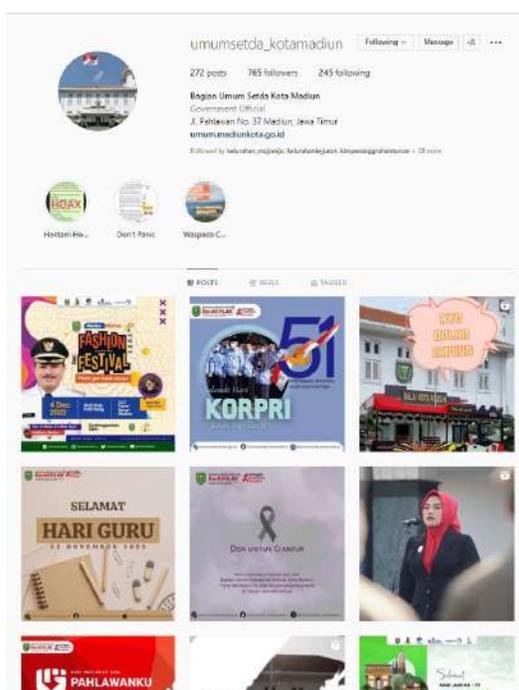


5 Bagian Umum

1. Website



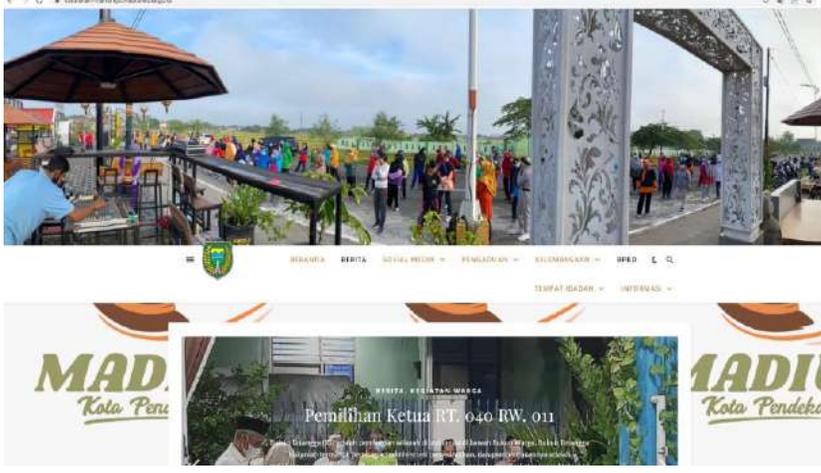
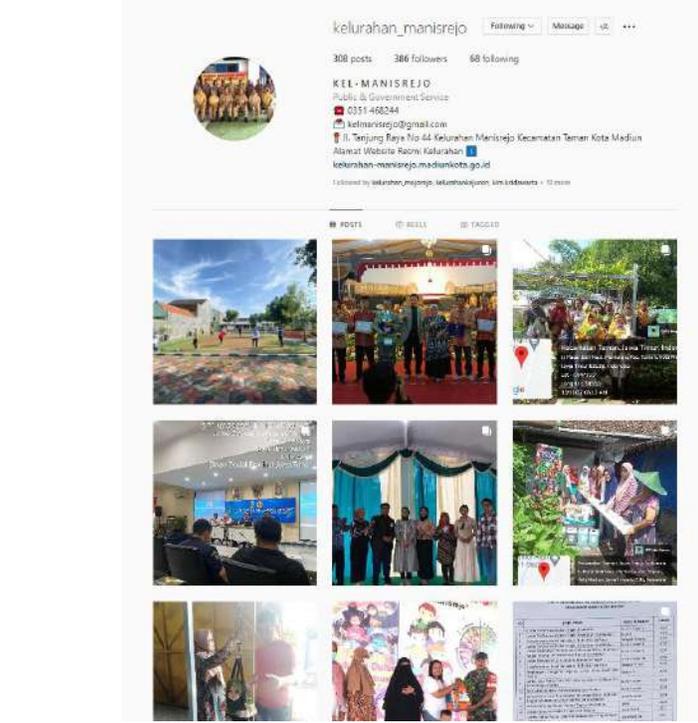
2. Media Sosial



3. Berita



b. PPID Pelaksana Kelurahan

No	Nama Kelurahan	Keterangan
1	Kelurahan Manisrejo	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 

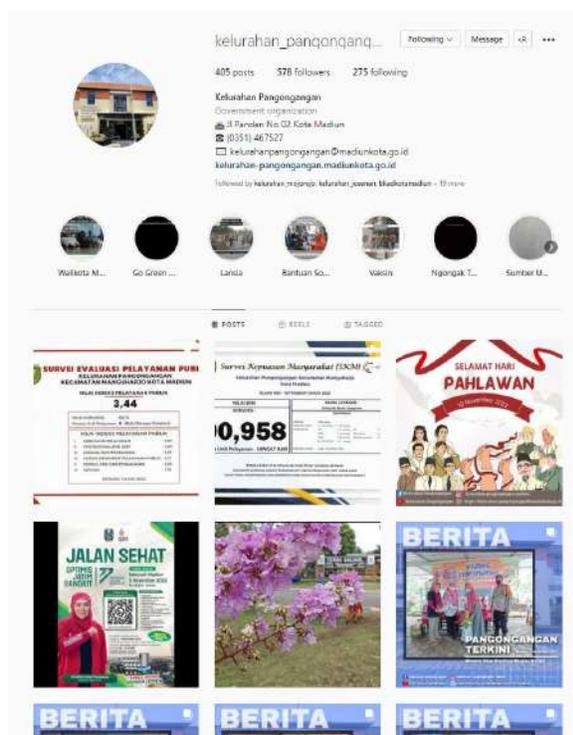
<p>2 Kelurahan Josenan</p>	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 
----------------------------	---

3 Kelurahan Pangongangan

1. Website

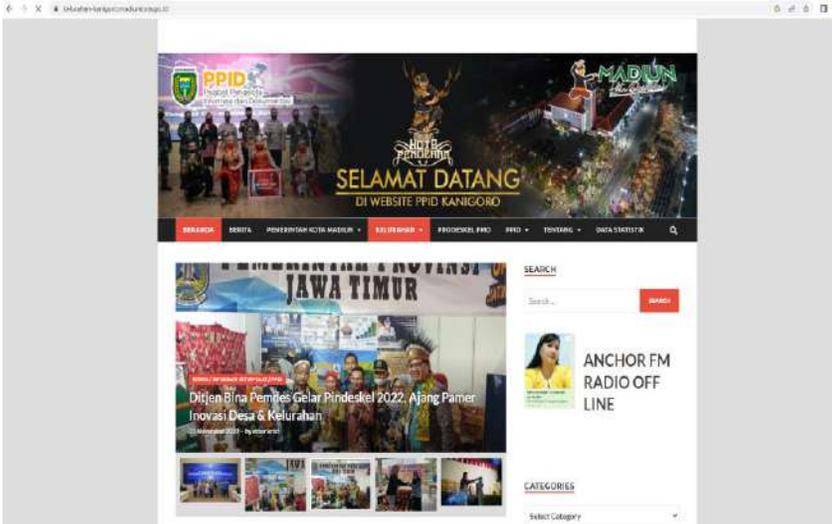
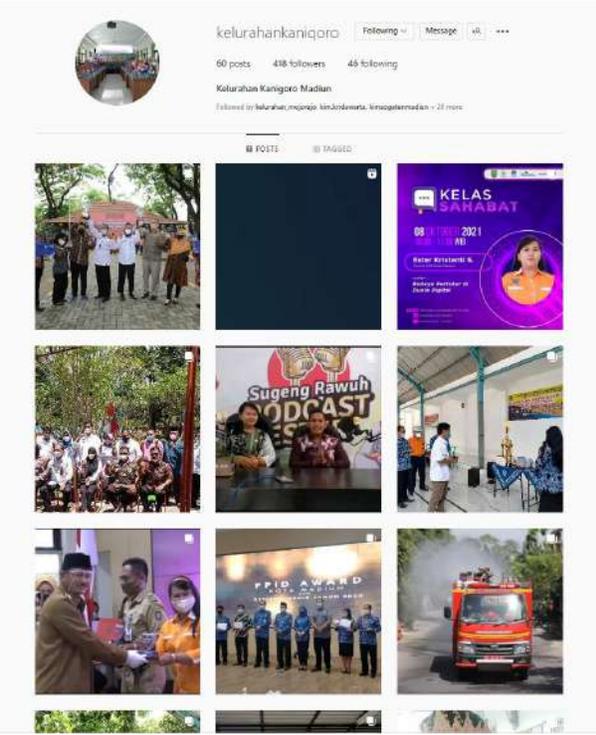


2. Media Sosial



3. Berita



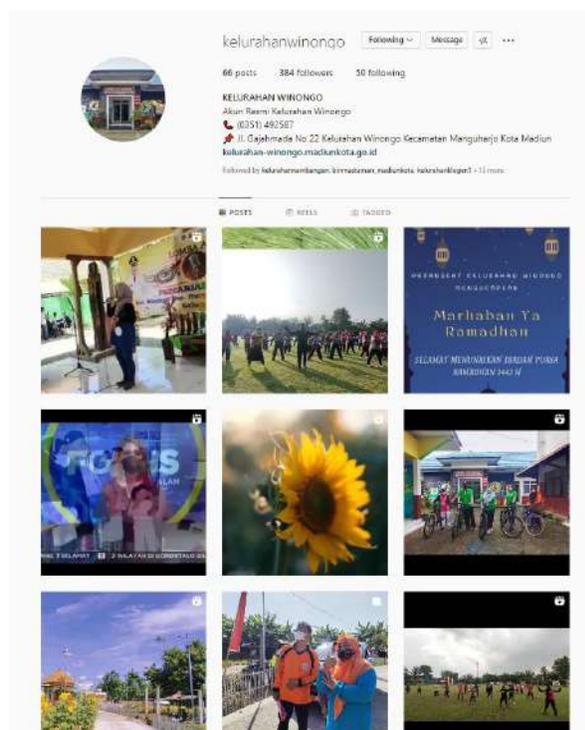
<p>4 Kelurahan Kanigoro</p>	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 
-----------------------------	---

5 Kelurahan Winongo

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui tahapan awal pengumpulan SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) oleh masing – masing PPID Pelaksana baik OPD maupun Kelurahan dan dilanjutkan tahapan pelaksanaan visitasi (kunjungan) ke PPID Pelaksana terpilih, serta tahapan akhir presentasi paparan oleh Admin PPID Pelaksana terpilih dapat dilihat tingkat keterbukaan informasi publik di masing–masing PPID Pelaksana.

Penilaian evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan pengisian SAQ oleh PPID Pelaksana dan beberapa aspek lain, seperti tampilan website, keaktifan admin, respon admin dalam menyelesaikan pengaduan, serta inovasi-inovasi pada masing-masing PPID Pelaksana.

KEPATUHAN PENGISIAN SAQ

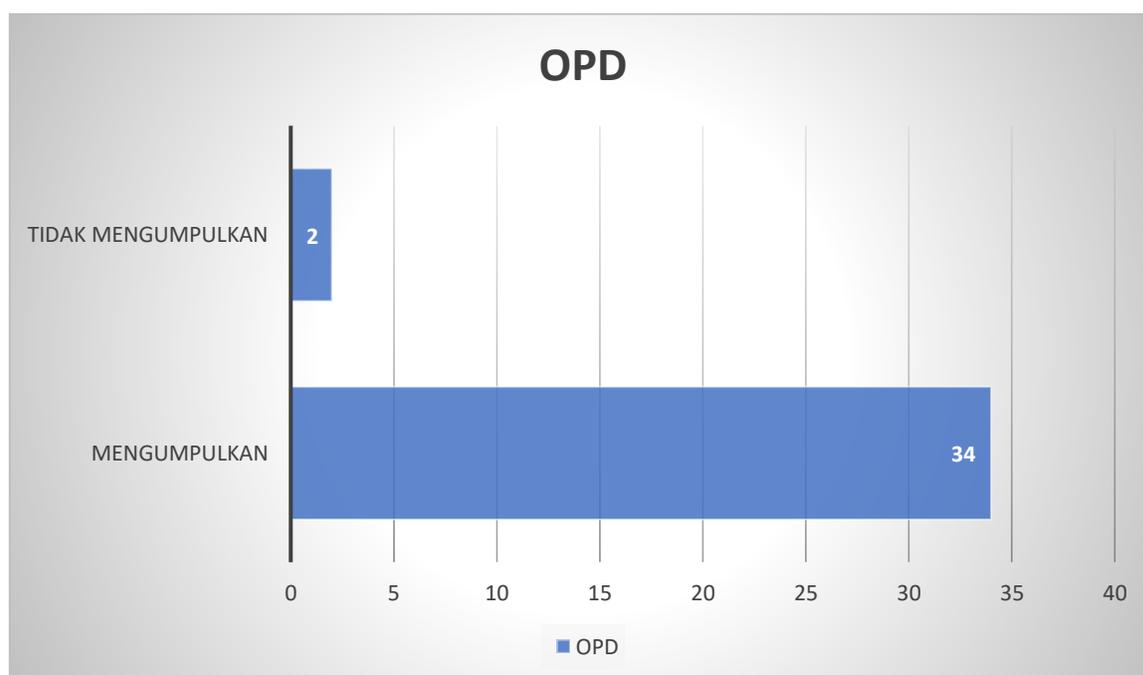


Table 1

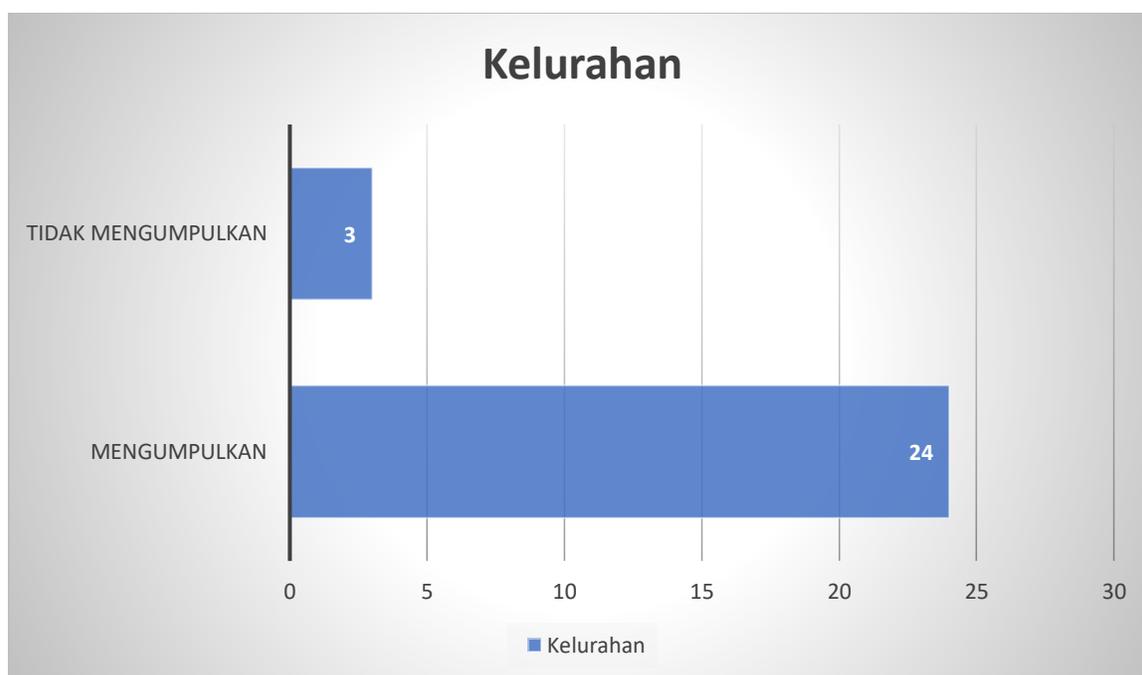


Table 2

Berdasarkan data di atas didapatkan hasil bahwa dari pengumpulan SAQ atas ketersediaan informasi publik PPID Kota Madiun tahun 2022 terdapat 34 PPID Pelaksana OPD yang telah mengumpulkan SAQ dari 36 PPID Pelaksana OPD. Sehingga didapatkan hasil tingkat kepatuhan pengisian SAQ PPID Pelaksana OPD mencapai nilai 94%. Sementara untuk PPID Pelaksana Kelurahan, yaitu terdapat 24 PPID Pelaksana Kelurahan yang telah mengumpulkan SAQ dari 27 PPID Pelaksana Kelurahan yang ada. Sehingga, hasil kepatuhan pengisian SAQ PPID Pelaksana Kelurahan mencapai nilai 88%. Beberapa PPID Pelaksana OPD dan Kelurahan yang belum mengumpulkan SAQ menunjukkan masih rendahnya perhatian dari PPID Pelaksana terhadap keterbukaan informasi publik

TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan evaluasi SAQ Monev PPID Pelaksana Tahun 2022 diketahui tingkat keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana di Kota Madiun sebagai berikut:

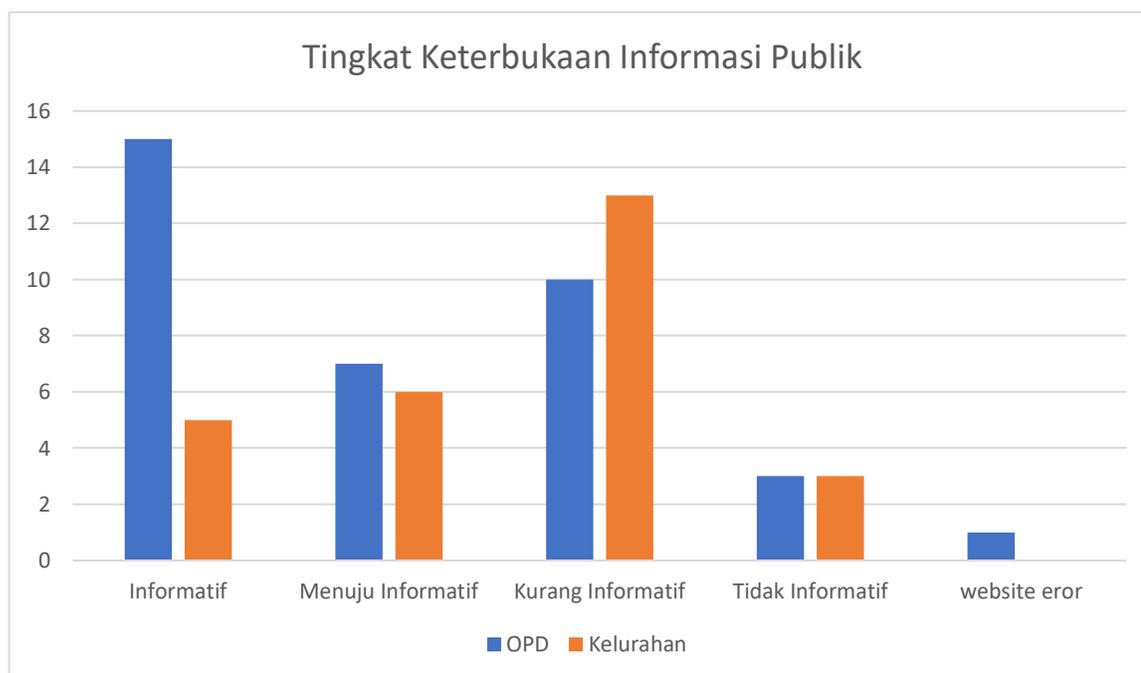


Table 3

Berdasarkan hasil Table 3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di OPD, yaitu terdapat 15 PPID Pelaksana OPD dengan kategori informatif, 7 PPID Pelaksana OPD dengan kategori menuju informatif, 10 PPID Pelaksana OPD dengan kategori kurang informatif, 3 PPID Pelaksana OPD dengan kategori tidak informatif dan 1 PPID Pelaksana OPD websitenya *error* (terkendala teknis).

Sedangkan untuk PPID Pelaksana Kelurahan dapat dianalisa bahwa terdapat 5 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori informatif, 6 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori menuju informatif, 13 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori kurang informatif dan 3 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori tidak informatif.

Berdasarkan hasil analisa evaluasi hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun Tahun 2022 dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana OPD mencapai nilai 89% sedangkan untuk kelurahan mencapai nilai 89%. Maka, dapat diketahui rata – rata nilai keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana Kota Madiun mencapai 89%.

BAB IV

Lampiran Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Kota Madiun

a. Visitasi PPID Kota Madiun ke PPID Pelaksana



b. Presentasi Admin PPID Pelaksana



